

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS (Studi Kasus pada SMP Negeri 05 Batu)

Analysis of The School Operational Assistance Funds (Case Study at SMP Negeri 05 Batu)

Thomas Djaka Setya BW, Siti Anissah Kiptiyani

Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng no. 62 – 64, Malang, 65146, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the realization of the BOS budget and also accountability and transparency of financial reporting at SMP Negeri 05 Batu. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Sources of data in this study are primary data sources and secondary data. The results show that the implementation of accountability and transparency in the management of BOS funds has been running quite well, namely the existence of RKAS in the planning of BOS funds, compliance with rules and technical instructions for the use and implementation of BOS funds with their realization, as well as the implementation of reporting and accountability of BOS funds to schools, cities/districts and the central government. This fact shows that the school has carried out the BOS fund management process in accordance with government regulations or in the Technical Guidebook.

Keywords: BOS Funds; BOS Funds Management Accountability; Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui realisasi anggaran dana BOS dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam pelaporan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SMP Negeri 05 Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau dalam Buku Petunjuk Teknis.

Kata Kunci: Dana BOS; Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah; Akuntabilitas; Transparansi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan sendiri adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan serta

kebiasaan yang dilakukan satu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Pencapaian pendidikan masyarakat suatu bangsa merupakan wujud kepedulian dan kemajuan bangsa tersebut. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis, tetapi juga mencakup karena persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut adanya manajemen pendidikan yang lebih baik (Mulyasa, 2012). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dukungan dari pemerintah berupa pengadaan sarana dan prasarana. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Sarana dan prasarana pendidikan sangat penting, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memerlukan perhatian yang serius untuk mewujudkan daya dukung proses pembelajaran yang baik. Sarana dan Prasarana tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan. Sebab, tanpa adanya sarana dan prasarana, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik (Rahayu & Utama, 2015). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Proses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terus menerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Institusi pendidikan yang bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal.

Manajemen sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh komponen dalam sekolah, seperti guru, karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya. Hubungan komponen-komponen tersebut harus sinergis agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.

Sebagai penunjang kegiatan manajemen, aspek keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam realisasi rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya. Pengelolaan keuangan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan adalah melalui program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Yang mana menurut "Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Tujuan penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan anggaran dana BOS dilihat dari aspek transparansi dan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggara dalam memegang tanggungjawab terhadap pencapaian hasil. Penerapan prinsip tersebut akan menimbulkan persepsi publik sekaligus pihak terkait (stakeholders) bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersih dan profesional. Sekolah yang bersih dan bertanggungjawab artinya bahwa sekolah tidak melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) serta bertanggungjawab baik secara keilmuan maupun fungsional.

Adapun sekolah yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian adalah SMP Negeri 05 Batu. Penulis memilih SMP Negeri 05 Batu sebagai lokasi penelitian karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah di Kota Batu yang menerima dana BOS dan terletak cukup jauh dari pusat kota. Selain itu di sekolah tersebut jumlah siswa dan guru dapat dikatakan tidak terlalu banyak.

METODE

Lingkup penelitian ini adalah bidang akuntansi sektor publik khususnya penelitian tentang pengelolaan dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan Permendikbud

Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan dalam pengelolaan dana BOS menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), ada beberapa kriteria yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana BOS seperti menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparansi. Tujuan penerapan prinsip ini adalah agar pengelolaan dana BOS menjadi tepat sasaran dan meminimalkan tingkat penyimpangan dan penyelewengan. Menurut Minarti dalam Sulfiati et.al (2010) akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan akuntabilitas menurut (Sulfiati et.al, 2010) adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan serta mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Menurut Nanang Fattah dalam Arti (2020), ukuran pendidikan yang akuntabel adalah (1) tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus, (2) kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan, (3) hasilnya efektif karena tujuan tercapai, (4) proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia, (5) menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

Transparansi berarti keterbukaan akan kebijakan keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, keterbukaan penggunaannya serta pertanggungjawabannya sehingga akan mempermudah stakeholder untuk mengetahuinya (Hariswati, 2015). Prinsip transparansi memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Menurut Krina dalam Arti (2020) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 05 Batu yang berada di Jalan Lapangan Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan juga kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Untuk data primer penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru, maupun staff terkait. Untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, yang dikumpulkan dari dokumen sekolah, laporan, ataupun referensi yang relevan seperti kertas kerja RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan data Dapodik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi

situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMP Negeri 05 Batu merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Jawa Timur tepatnya berada di Jalan Lapangan Lemah Putih Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 2007 dan terletak di daerah pegunungan serta area persawahan yang cukup jauh dari pusat kota. Ditinjau dari faktor peserta didik, intake peserta didik SMP Negeri 05 Batu selama ini tergolong masih rendah dibanding SMP Negeri lain di Kota Batu dalam hal akademik. Minat dan motivasi belajar peserta didik pada umumnya masih rendah. Mereka cenderung memiliki minat dan bakat dalam bidang non akademik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi siswa SMPN 05 Batu pada penyelenggaraan OSN dan O2SN baik tingkat kota maupun provinsi. Kondisi internal peserta didik tersebut mendorong sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat memberikan layanan sesuai dengan tingkat dan jenis kecerdasan peserta didik sehingga pada muaranya prestasi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Pengembangan juga dilakukan pada ekstrakurikuler yang selama ini terus memberikan prestasi terbaik pada sekolah.

Dari sisi sarana dan prasarana, SMP Negeri 05 Batu masih terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. SMP Negeri 05 Batu memiliki 8 ruang kelas dengan ruang penunjang berupa 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium bahasa, 1 ruang laboratorium TIK dan 1 ruang laboratorium IPA. Untuk sarana penunjang pengembangan pembelajaran berbasis TIK berupa komputer dan jaringan internet sudah memadai hanya perlu perawatan saja. Salah satu hal yang masih menjadi kekurangan SMP Negeri 05 Batu adalah belum memadainya ruang penyimpanan atau gudang. Sehingga beberapa barang inventaris sekolah kurang terawat dan tidak diletakkan sebagaimana mestinya. Pengajuan dana untuk menambah ruang penunjang sudah sangat sering dilakukan namun tidak kunjung memperoleh persetujuan mengingat jumlah ruang yang ada dinilai Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan aturan yaitu dihitung berdasarkan total keseluruhan peserta didik. Namun SMP Negeri 05 Batu terus berupaya dengan berkomunikasi aktif dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, Pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Untuk tenaga pendidik SMP Negeri 05 Batu berjumlah 13 orang dengan spesifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang dan S1 sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk memperlancar proses layanan pendidikan, SMP Negeri 05 Batu didukung oleh tenaga kependidikan sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 tenaga administrasi, 1 tenaga perpustakaan, dan 1 tenaga kebersihan. Dan untuk pengaturan beban kerja pendidik SMP Negeri 05 Batu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru dan Bab IV Pasal 52, 53 dan 54 tentang

Beban Kerja. Sedangkan untuk jumlah peserta didik setiap kelas sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Proses, yaitu 20 - 32 peserta didik/kelas.

Hasil penelitian ini akan menguraikan deskripsi data tentang pengelolaan dana BOS diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam perencanaan perlu melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Dimana dalam perencanaan dana BOS meliputi dua kegiatan utama yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam implementasinya SMP Negeri 05 Batu telah melakukan perencanaan diawali dengan evaluasi diri. Dengan adanya evaluasi diri sekolah dapat mengetahui bagian mana yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, serta bagian yang mengalami penurunan. Kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri, kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS akan menyusun RKAS. RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS berdasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Untuk penerimaan dana SMP Negeri 05 Batu pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 2 sumber dana, yaitu BOS Reguler yang bersumber dari APBN sejumlah Rp. 177.600.000,-, dengan rincian jumlah siswa 162 x Rp.1.096.000 per tahun dan dari APBD Kota Batu berupa BOSDA sejumlah Rp. 67.200.000. Dengan demikian dana BOS yang didapatkan untuk tahun ajaran 2021/2022 di SMP Negeri 05 Batu adalah Rp. 244.800.000. Selanjutnya anggaran dana BOS Reguler tersebut oleh pihak SMP Negeri 05 Batu dialokasikan untuk program sekolah sebagai peningkatan kualitas pendidikan dalam bentuk pengembangan program kegiatan yang menunjang proses pendidikan.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 05 Batu telah mengikuti aturan yang berlaku dalam Buku Petunjuk Teknis yang terdiri dari beberapa bagian yaitu (a) Penyaluran dana BOS, tahun 2021 Menteri Pendidikan menyebut ada tiga pokok kebijakan dana BOS yang membedakan dengan tahun sebelumnya. Pertama, nilai satuan biaya BOS kini bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Sehingga besaran satuan dana BOS bisa berbeda tiap daerah. Kedua, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Kepala sekolah kini dapat menggunakan dana BOS untuk mempersiapkan pembelajara tatap muka di tahun ajaran baru 2021. Ketiga, laporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring. (b) Pengambilan dana BOS, dilakukan melalui bank penyalur dari pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah/bendahara BOS atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku (c) Penggunaan dana BOS, penulis dapat mengetahui berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar dana BOS dialokasikan untuk Pengembangan Standar Pembiayaan sebesar 39,25 % yang meliputi biaya konsumsi, pembayaran honor guru, serta biaya langganan daya dan jasa. Penggunaan sebagian besar juga

untuk pengembangan standar proses sebesar 19% yang meliputi biaya penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta pembiayaan peringatan hari besar agama dan nasional (d) Pembelanjaan dana BOS, akan dicatat dalam buku kas pembantu yang membantu sebagai catatan atas pengeluaran kebutuhan sekolah. Dalam pembelanjaan pun juga mempertimbangkan nilai guna dan ketersediaan dana dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen keuangan sekolah bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (e) Pembukuan dana BOS, tim belanja harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi tersebut berguna untuk pelaporan dana BOS, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat/daerah atas penggunaan dana yang diberikan (f) Pengembalian dana BOS, hanya dikhususkan untuk sekolah yang mengalami penyaluran dana BOS melebihi jumlah dana yang seharusnya. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan data. Kelebihan dana tersebut juga mempunyai akibat yang penting bagi sekolah, karena dapat berhubungan dengan hukum karena kaitannya dengan uang negara. Dan di SMP Negeri 05 Batu sendiri belum pernah terjadi pengembalian dana BOS (g) Pertanggungjawaban keuangan dana BOS, adalah dengan adanya dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). LPJ adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi atau kelompok kepada organisasi lainnya yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat. Fungsi dari LPJ ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

Pengawasan penggunaan dana BOS di SMP negeri 05 Batu pertama dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung. Kepala sekolah juga rutin memeriksa laporan keuangan sekolah pada akhir bulan dan memeriksa bukti-bukti pembayaran. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu setiap tiga bulan sekali terkait dengan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 05 Batu.

Metode pengumpulan data adalah metode pengamatan dan wawancara serta dokumentasi, berdasarkan pengamatan langsung dan dokumen yang disajikan serta wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala SMP Negeri 05 Batu dan bendahara BOS dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan dana BOS harus sesuai dengan apa yang tertera dalam RKAS, hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang berarti bahwa sekolah telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS yang diperoleh sebagai sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan RKAS di SMP Negeri 05 Batu juga telah melibatkan seluruh komponen sekolah sehingga dalam penyusunannya dapat mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa SMP Negeri 05 Batu telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS dengan adanya keterlibatan

guru dan karyawan dalam Tim Manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dan juga terlihat dari keterbukaan penggunaan dana BOS kepada masyarakat terutama orangtua siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa SMP Negeri 05 Batu telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS dengan baik. Untuk akuntabilitas dapat dilihat dari penggunaan dana BOS yang selalu sesuai dengan RKAS dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien serta melaporkan penggunaan dana BOS melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Untuk transparansi dapat dilihat dari komitmen sekolah untuk selalu melibatkan seluruh komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, dan pegawai dalam pembuatan RKAS serta selalu menyampaikannya kepada masyarakat khususnya orang tua siswa dan dibuktikan dengan ditempelkannya RKAS di papan pengumuman sekolah yang berada di halaman depan sekolah.

Penulis juga memberikan saran agar kepala sekolah dan tim manajemen BOS terus meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS khususnya dalam menjalin komunikasi dengan seluruh guru maupun stakeholders akan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 05 Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sudrajat. (2010). Manajemen Keuangan Sekolah | tentang PENDIDIKAN. 18 Januari. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>
- Ammar, F., & Bustamam, B. (2019). Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 Dan Smp Islam Ypui Darul Ulum Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 116. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10804>
- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan / Sekolah. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1–6. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10646>
- F, Sulfiati., Andi, Samsu Alam., Andi, L. I. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Meraja Journal*, 2(41), 185–201.
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP*, 2, 33–39.
- Hariswati, N. (2015). Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bos. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 75. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.75-88>

- Krisnayanti, I. A. P. (2014). Analisis Persepsi Stakeholder Internal Dan Eksternal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 4, 1-13. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/4520>
- Mulyasa (2012), Sekolah Menengah Pertama. *Pengolahan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*, 27(1), 123-129. https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
- Rahayu, S. M., & Utama. (2015). Sekolah Menengah Pertama. *Pengolahan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*, 27(1), 123-129. https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
- Soegijono, M. S.. Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. 1993. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*.
- Sudrajat, A. 2010. Manajemen Keuangan Sekolah. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/ia>.
- Siswoko Dwi dkk (2013).. Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan / Sekolah. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1-6..